

REDEFINISI SANKRI DAN PENGUATAN SANKRI UNTUK PEMBANGUNAN APARATUR NEGARA

OLEH:

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PUSDIKMIN LEMDIKLAT

<http://www.pusdikmin.com>

Daftar Isi :

1. REDEFINISI SISTEM ADMINISTRASI NEGARA PASCA REFORMASI
2. UNSUR-UNSUR DALAM DEFINISI SANKRI
3. ISU, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN SANKRI LIMA TAHUN KE DEPAN
4. MEKANISME HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA NEGARA: KHUSUSNYA LEMBAGA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF
5. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN PENGUATAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR SUBSISTEM ADMINISTRASI NEGARA
6. PENGUATAN ELEMEN STRATEGIS DALAM SANKRI UNTUK MENDUKUNG PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA
7. PERAN LAN DALAM PENGUATAN SANKRI UNTUK PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA

REDEFINISI SANKRI PASCA REFORMASI

- Administrasi sebagai “... *cooperative human effort toward reaching some goal or goals accepted by those engaged in the endeavour*” (Ferrel Heady, 2001:2)
- Karakteristik Administrasi Sektor Publik
 - (a) Merupakan usaha kelompok kerjasama dalam susunan kenegaraan;
 - (b) Mencakup ketiga cabangnya yaitu eksekutif, legislatif, dan yudisial, serta saling hubungan antara ketiganya;
 - (c) Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan umum (negara) sehingga karenanya merupakan proses politik;
 - (d) Secara nyata berbeda dari administrasi swasta; dan
 - (e) Erat kaitannya dengan berbagai kelompok swasta maupun individu dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.

(Nigro dan Nigro, 1980: 14)

REDEFINISI SANKRI PASCA REFORMASI

- Administrasi Negara di Indonesia lebih merujuk kepada bekerjanya seluruh komponen bangsa dan para penyelenggara negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara secara berdayaguna dan berhasilguna
- Pengertian Administrasi Negara secara lebih luas mencakup ***“aktivitas seluruh lembaga negara, baik lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan sebagainya”***

(Lembaga Administrasi Negara, 2005 : 4).

REDEFINISI SANKRI PASCA REFORMASI

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (SANKRI) ADALAH:

***“SISTEM PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN NEGARA DAN BANGSA
DALAM SEGALA ASPEKNYA, DENGAN MENDAYAGUNAKAN SEGALA
KEMAMPUAN SELURUH APARATUR NEGARA BESERTA RAKYAT DAN
DUNIA USAHA/SWASTA UNTUK MEMANFAATKAN SEGENAP SUMBER
DAYA YANG TERSEDIA SECARA NASIONAL, DEMI TERCAPAINYA
TUJUAN DAN TERLAKSANANYA TUGAS NASIONAL/NEGARA
SEBAGAIMANA DIMAKSUD UUD 1945.”***

(Lembaga Administrasi Negara, 2005 : 10)

**DIWARNAI OLEH PERKEMBANGAN PERUBAHAN PARADIGMA DARI PERANAN SERBA NEGARA (*STATISM*)
ATAU DOMINASI PEMERINTAH (*GOVERNMENT*) MENJADI TATA KEPEMERINTAHAN (*GOVERNANCE*) YANG
MENCERMINKAN INTERAKSI SOSIAL-POLITIK ANTARA PARA PENYELENGGARA NEGARA DENGAN
MASYARAKAT UMUM DAN DUNIA USAHA (SWASTA) DALAM BERBAGAI KEGIATAN GUNA MEWUJUDKAN
TUJUAN NEGARA DAN TUJUAN PEMERINTAHAN NEGARA BERDASARKAN UUD 1945.**

REDEFINISI SANKRI PASCA REFORMASI

- Definisi SANKRI telah mengakomodasi perkembangan disiplin keilmuan administrasi, administrasi negara, pemerintahan (*governance*) yang berkembang sejak tahun 1980-an
- Secara faktual SANKRI telah menjadi praktik terbaik dan karya prestasi bangsa Indonesia bahkan sebelum negara-negara maju sekalipun mempraktikannya
- SANKRI memiliki sumber acuan yang sangat prinsipil, yaitu Pembukaan UUD NRI 1945, UUD NRI 1945 beserta keempat amandemennya, dan didasarkan kepada nilai-nilai ideologi Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

UNSUR-UNSUR DALAM DEFINISI SANKRI

- **Unsur Tujuan atau Hasil:**

Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur

- **Unsur Proses:**

Seluruh fungsi penyelenggaraan negara, pemerintahan negara dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha/swasta

- **Unsur Sumber Daya Nasional:**

sumber daya alam maupun sumber daya buatan yang tersedia di bumi Indonesia yang dikelola untuk sebesar-besarnya hajat hidup rakyat banyak

- **Unsur Kemampuan:**

Kapasitas dan kompetensi seluruh unsur aparatur negara bersama masyarakat dan dunia usaha

- **Unsur Sistem Penyelenggaraan Kehidupan Negara dan Bangsa:**

SANKRI bekerja berdasarkan UUD NRI 1945, hukum, dan peraturan perundangan yang mengatur segala sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

**ISU, PERMASALAHAN, DAN
TANTANGAN
PENYELENGGARAAN SANKRI
LIMA TAHUN KE DEPAN**

Isu Strategis

- ⦿ **Peningkatan Kemampuan Daya Saing Nasional**
- ⦿ **Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat**
- ⦿ **Peningkatan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial**
- ⦿ **Percepatan Pembangunan Sistem Administrasi Negara**
- ⦿ **Peningkatan Kualitas Proses Penyelenggaraan Administrasi Negara**

Permasalahan Daya Saing Nasional

Tabel 1: Ranking Daya Saing 55 Negara

Sumber: IMD, 2007

<i>Country</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>
USA	1	1
Singapore	3	2
Hongkong	2	3
Switzerland	8	6
Australia	13	11
China	18	15
Taiwan	17	18
Malaysia	22	23
India	27	27
Korea	32	29
Thailand	29	33
Philippines	42	45
Indonesia	52	54
Venezuela	53	55

Permasalahan Daya Saing Nasional

Tabel 2: Negara-Negara Tujuan Operasi Bisnis Dalam Jangka Menengah (3 tahun atau lebih)

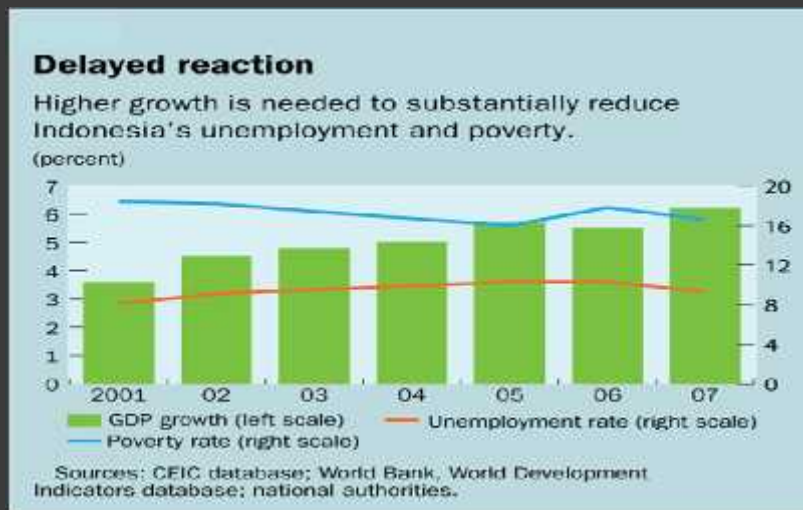
Sumber: Jetro based on JBIC.

Rank	1997	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1st	China	China	China	China	China	China	China	China
2nd	USA	USA	USA	Thailand	Thailand	Thailand	India	India
3rd	Indonesia	Thailand	Thailand	USA	USA	Vietnam	Thailand	Vietnam
4th	Thailand	Indonesia	Indonesia	Indonesia	Vietnam	India	Vietnam	Thailand
5th	India	Malaysia	India	Vietnam	India	USA	USA	USA
6th	Vetnam	Taiwan	Vietnam	India	Indonesia	Russia	Russia	Russia
7th	Philippines	India	Thailand	Korea	Korea	Indonesia	Korea	Brazil
8th	Malaysia	Vietnam	Korea	Taiwan	Taiwan	Korea	Indonesia	Korea
9th	Brazil	Korea	Malaysia	Malaysia	Malaysia	Taiwan	Brazil	Indonesia
10th	Taiwan	Philippines	Singapore	Brazil	Russia	Malaysia	Taiwan	Taiwan

Permasalahan Daya Saing Nasional

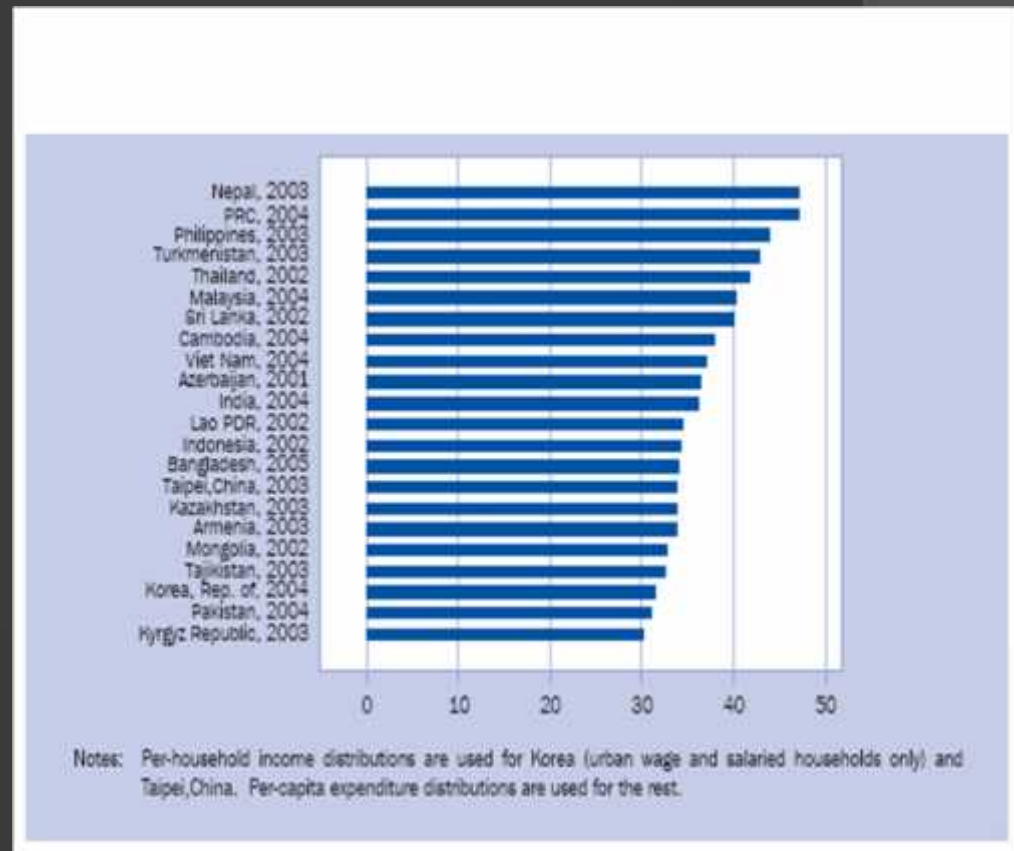
- ◉ Infrastruktur Kawasan Ekonomi/Industri dan sistem pelayanan investasi
- ◉ Kebijakan insentif investasi kurang kompetitif
- ◉ Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia: kualitas, militansi, hubungan industrial
- ◉ Standar produk barang dan jasa kurang kompetitif
- ◉ Ekonomi Biaya Tinggi (high-cost economy)
- ◉ Kepastian hukum masih lemah
- ◉ Lemahnya publikasi dan promosi dagang dan industri di berbagai negara
- ◉ Kemampuan daya beli masyarakat relatif rendah

Permasalahan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat



Sumber: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2007/CAR1010A.htm>

Grafik 1 : Hubungan Antara Pertumbuhan PDB, Angka Kemiskinan, dan Angka Pengangguran



Sumber: ADB, 2007, Inequality in Asia: Highlight Key Indicators 2007 Special Chapter (<http://www.adb.org>)

Grafik 2: Koefisien Gini Negara-Negara Berkembang Anggota ADB (Pengeluaran Konsumsi dan Distribusi Pendapatan)

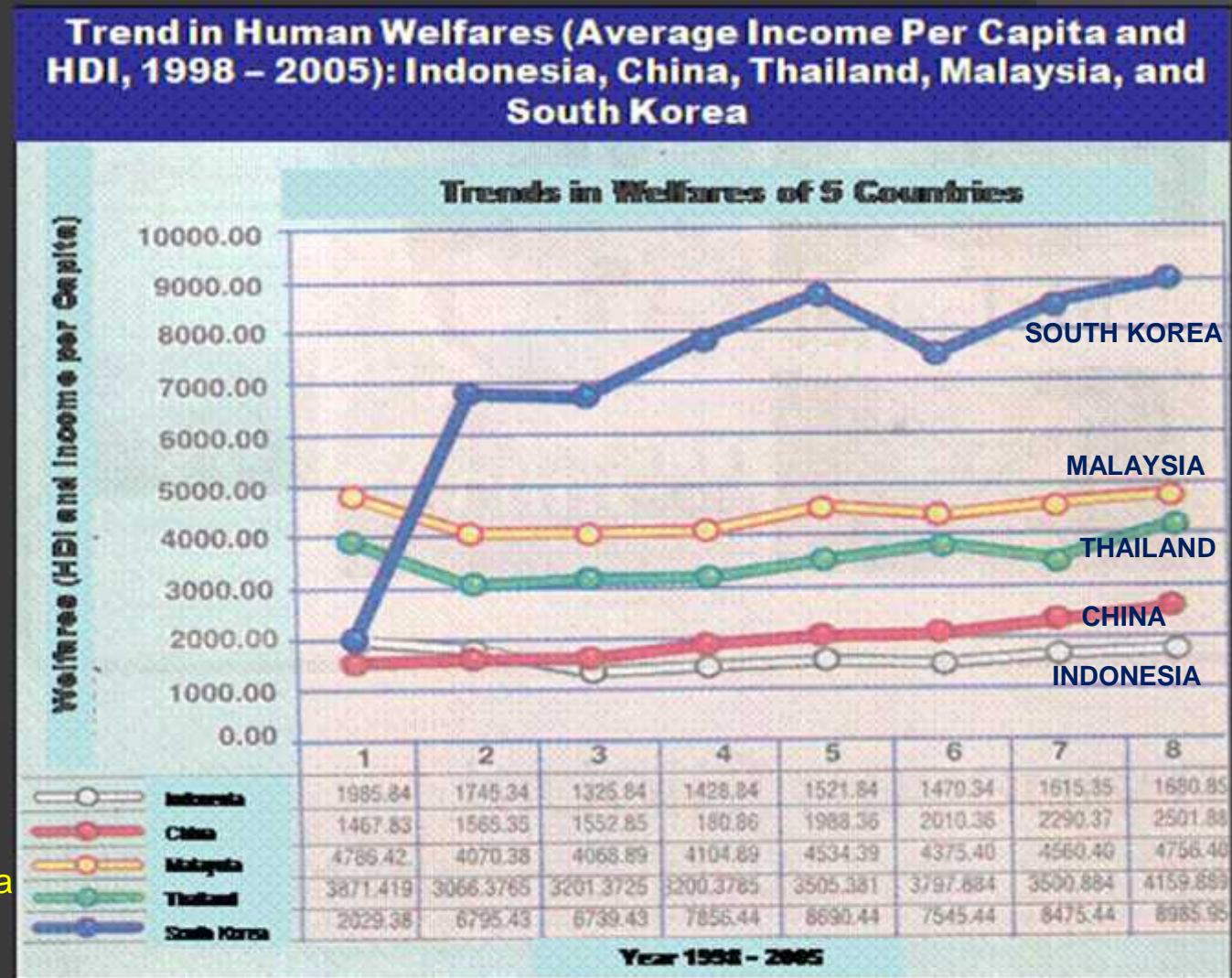
Permasalahan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

- ⦿ Laju Pertumbuhan Ekonomi nasional masih cenderung didorong oleh faktor konsumsi
- ⦿ Laju pertumbuhan investasi relatif rendah
- ⦿ Kemampuan daya beli relatif rendah, angka kemiskinan masih tinggi
- ⦿ Kesenjangan distribusi pendapatan
- ⦿ Otonomi daerah sebagai instrumen redistribusi pendapatan belum optimal

Permasalahan Kesejahteraan Sosial

Grafik 3: Trend Kesejahteraan Manusia (Tingkat Pendapatan Per Kapita Rata-rata dan IPM, 1998-2005) Indonesia, Cina, Thailand, Malaysia dan Korea Selatan

Tahun 2005, Kinerja Skor Human Development Index untuk Indonesia adalah 0.728, angka indeks tersebut menempatkan posisi Indonesia pada urutan ke-107 dari sejumlah 177 negara



Source: Damarihuri, Didin S., 2008, *Demokrasi Indonesia, Masih Berjuang Menciptakan Kesejahteraan (Indonesian Democracy: Struggling for Creating Welfares)*, article, Jakarta, Media Indonesia, Friday, May 23rd, 2008, p.21.

**Gagasan Tema Pembangunan Ekonomi
Periode 2009-2014 :**

**“Percepatan Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat Untuk Percepatan
Pembangunan Ekonomi Produktif”**

**Gagasan Tema Kinerja SANKRI
Periode 2009-2014 :**

**“Percepatan Pembangunan
Administrasi Negara Bagi Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat dan Percepatan
Pembangunan Ekonomi Produktif”**

Permasalahan Pembangunan SANKRI

- ⦿ Kepastian hukum Lembaga Negara: a.l. DPD
- ⦿ Kedudukan MPR
- ⦿ Kelembagaan Yudikatif
- ⦿ Kelembagaan Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum
- ⦿ Kepastian hukum sistem demokrasi politik
- ⦿ Peraturan perundang-undangan reformasi birokrasi: RUU AP, RUU EP, RUU PP, RUU KN
- ⦿ Kedudukan lembaga independen (komisi-komisi negara)
- ⦿ Harmonisasi Perundang-undangan sektoral

Permasalahan Kualitas Proses Penyelenggaraan Administrasi Negara

- Masalah **Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja**:
 - Cenderung Rigid, masih “*line & item*”, *Disbursement* lambat.
- Masalah **Pengadaan Barang dan Jasa**:
 - Ketatnya Syarat Sertifikasi dan Penyeragaman Kewajiban Tender untuk semua jenis kegiatan di atas nilai anggaran tertentu
- Masalah **proses pelaksanaan SANKRI**:
 - Potensi PNS “Kehilangan Beban Kerja Teknis” karena kewajiban “*Contracting out*”
 - Kebutuhan tenaga ahli di lembaga Legislatif
 - Partisipasi Politik Masyarakat cenderung mulai meresahkan
 - Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik belum efektif
 - Pengelolaan keluhan masyarakat masih lemah
- Masalah **Proses Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan**:
 - Mindset anti korupsi belum merata di kalangan aparatur negara
 - Penyalahgunaan fungsi WASNAL dan WASMAS
 - Kapasitas pelaksanaan akuntansi keuangan masih lemah
- Masalah **Evaluasi dan Pertanggungjawaban**:
 - Manajemen kinerja belum optimal
 - Indikator kinerja proforma
 - Sistem Akuntabilitas Publik masih bersifat hierarkhis dan vertikal
 - Mekanisme Pelaporan Pertanggungjawaban & Akuntabilitas Lembaga Negara kepada masyarakat masih belum jelas
 - Pengukuran dan perankingan kinerja cenderung menjadi alat “*Shaming and Blaming*”

**MEKANISME HUBUNGAN
ANTAR PENYELENGGARA NEGARA:
KHUSUSNYA LEMBAGA LEGISLATIF DAN
EKSEKUTIF**

MEKANISME HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA NEGARA: KHUSUSNYA LEMBAGA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF (1)

- ⦿ Mekanisme “Checks and Balances System”
- ⦿ DPR memiliki hak-hak tertentu, yaitu: Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat
- ⦿ DPR dapat memanggil eksekutif/pejabat publik untuk konsultasi, informasi, dsb dengan hak Poena, terdapat sanksi untuk pengabaian
- ⦿ DPR dan Presiden setara, tidak dapat saling menjatuhkan (Sistem Presidensiil)

MEKANISME HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA NEGARA: KHUSUSNYA LEMBAGA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF (2)

- DPR mitra Eksekutif dan Birokrasi dalam perumusan kebijakan politik dan UU
- Pelaksanaan Hak Budget bersifat terbuka untuk umum, kecuali dinyatakan lain: KPK dan siapapun dimungkinkan mengikuti sidang pembahasan anggaran antara DPR dgn Eksekutif selama dinyatakan terbuka untuk umum
- Kelembagaan dan kedudukan Fraksi Parpol cenderung lebih dominan daripada Komisi & Panja dan Pansus DPR dalam pengambilan keputusan DPR. Oposisi dan dukungan melalui Fraksi Parpol bukan melalui representasi wakil rakyat

MASALAH HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR SUBSISTEM ADMINISTRASI NEGARA

- Hubungan kelembagaan dalam praktik administrasi negara masih cenderung mengikuti aturan permainan “menang-kalah”, bukan permainan “menang-menang” atau konsensus
- Seringkali dilandasi oleh idealisme sempit golongan, egoisme sektoral, atau bahkan ambisi-ambisi dan kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan tertentu.

**LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN
PENGUATAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN
ANTAR SUBSISTEM ADMINISTRASI
NEGARA**

LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN PENGUATAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR SUBSISTEM ADMINISTRASI NEGARA (1)

- **Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan UUD NRI 1945 serta Nilai-nilai Kebangsaan.**
 - internalisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam penyelenggaraan SANKRI,
 - difusi inovasi operasionalisasi nilai-nilai kebangsaan sesuai tuntutan jaman
- **Penyempurnaan Kepranataan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Negara**
 - Agenda Amandemen Kelima UUD NRI 1945 untuk menjamin perkuatan kelembagaan penyelenggaraan administrasi negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan tata pemerintahan yang baik
- **Penguatan Kelembagaan DPD**
- **Peninjauan Kembali Kelembagaan MPR dan lembaga negara lainnya**
- **Peninjauan Kembali Kepranataan Lembaga Negara Independen:**
 - Rasionalisasi, Integrasi, Akuntabilitas Kinerja

LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN PENGUATAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR SUBSISTEM ADMINISTRASI NEGARA (2)

- **Pembentukan Sistem Administrasi Penyelenggaraan Demokrasi Politik**
 - Kepastian Hukum dan Perundang-undangan Sistem Politik Nasional
 - Kepastian Politik
 - Beban Anggaran Negara
- **Pembentukan UU mengenai Sistem dan Susunan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai Sistem Administrasi Pemerintahan Negara (Pemerintah Pusat).**
 - Payung hukum sistem kelembagaan, struktur, kedudukan, hak dan kewajiban, mekanisme kerja penyelenggaraan pemerintahan negara
 - Sumber acuan hukum peraturan perundang-undangan sektoral
- **Sinkronisasi dan Harmonisasi Sistem Administrasi Negara**
 - Kodifikasi, kompilasi peraturan perundang-undangan sektoral fungsional
 - Integrasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan sektoral
 - Kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat

**PENGUATAN ELEMEN STRATEGIS
SANKRI UNTUK MENDUKUNG
PEMBERDAYAAN APARATUR
NEGARA**

PENGUATAN ELEMEN STRATEGIS SANKRI UNTUK MENDUKUNG PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA

● **Penguatan Komponen Penyelenggaraan Negara**

- Amandemen UUD NRI 1945: susduk lembaga negara, haluan negara (pembangunan nasional), otonomi daerah, hubungan kelembagaan negara dengan birokrasi maupun dengan masyarakat dan dunia usaha,
- Kepastian hukum sistem politik nasional
- Penyempurnaan sistem dan mekanisme kekuasaan negara di bidang hukum (yudikatif)
- Penuntasan pembahasan, penetapan, dan pemberlakuan RUU Kebebasan Hak atas Informasi
- Pengaturan peran masyarakat dan dunia usaha dalam SANKRI
- Penyempurnaan sistem desentralisasi dan pemberian otonomi kepada daerah

PENGUATAN ELEMEN STRATEGIS SANKRI UNTUK MENDUKUNG PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA

◎ **Penguatan Komponen Administrasi Pemerintahan**

- Penuntasan penetapan dan pemberlakuan RUU Administrasi Pemerintahan
- Penataan dan pengembangan sistem manajemen kebijakan publik
- Penuntasan pembahasan, penetapan, dan pemberlakuan RUU Kementerian Negara
- Penuntasan pembahasan, penetapan, dan pemberlakuan RUU Pelayanan Publik
- Penuntasan pembahasan, penetapan, dan pemberlakuan RUU Etika Pemerintahan
- Penyempurnaan sistem manajemen keuangan negara dan pemerintahan
- Penyempurnaan sistem dan mekanisme perencanaan yang berbasis kinerja, partisipatif, berorientasi manfaat publik
- Penyempurnaan sistem dan mekanisme pengelolaan kekayaan negara

PENGUATAN ELEMEN STRATEGIS SANKRI UNTUK Mendukung PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA

● **Penguatan Komponen Sumber Daya Manusia Aparatur**

• **Penguatan SDM Aparatur Penyelenggara Negara:**

Penyempurnaan mekanisme dan kriteria pemilihan pejabat negara melalui proses fit and proper test
Netralitas, independensi, dan integritas Tim Seleksi
Pejabat Negara dibawah sumpah

Transparansi kriteria kompetensi, integritas, dan kapabilitas calon pejabat negara

Mekanisme uji publik kelayakan kandidat pemilu/pilpres/pilkada

Pelebagaan mekanisme akuntabilitas publik berupa kontrak politik bagi seluruh pejabat negara

Pelebagaan Pembekalan Wacana strategis SANKRI bagi Pejabat Negara baru terpilih/diangkat

PENGUATAN ELEMEN STRATEGIS SANKRI UNTUK Mendukung PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA

● **Penguatan Komponen Sumber Daya Manusia Aparatur**

• **Penguatan SDM Aparatur Pemerintah (1)**

Penyempurnaan sistem administrasi kepegawaian negara

Penyempurnaan konsep dan struktur kepegawaian negara

Pengaturan mengenai kedudukan KORPRI sebagai lembaga profesi Pegawai Negara

Rasionalisasi struktur jabatan administrasi pemerintahan

Pengembangan sistem remunerasi dan pemberian tunjangan pegawai setara sektor swasta dan berbasis kompetensi

Pengembangan sistem penempatan pegawai dalam jabatan negeri maupun dalam jabatan struktural dan fungsional yang bersifat kompetitif, transparan, berbasis prestasi kinerja dan kompetensi.

PENGUATAN ELEMEN STRATEGIS SANKRI UNTUK Mendukung PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA

● **Penguatan Komponen Sumber Daya Manusia Aparatur**

• **Penguatan SDM Aparatur Pemerintah (2)**

Pengembangan sistem kontrak kerja untuk jabatan negeri maupun jabatan publik

Pengembangan sistem Diklat Profesi, Diklat Jabatan (Struktural dan Fungsional), serta diklat teknis fungsional bagi SDM aparatur pemerintah yang berbasis kompetensi dan berorientasi kinerja

Pengembangan sistem dan mekanisme regenerasi dan suksesi kepemimpinan lembaga pemerintah melalui sistem rekrutmen jabatan yang bersifat kompetitif, terbuka dan berbasis kompetensi

Pengembangan sistem evaluasi dan akuntabilitas kinerja obyektif

Pengembangan sistem pemberhentian pegawai baik dalam masa jabatan maupun dalam rangka pemensiunan yang berkeadilan bagi kelangsungan hidup dan penghidupan mantan pegawai

**PERAN LAN
DALAM PENGUATAN SANKRI
UNTUK PEMBERDAYAAN APARATUR
NEGARA**

PERAN LAN DALAM PENGUATAN SANKRI

◎ **Tugas Pokok:**

- “*melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

◎ **Fungsi:**

- pengkajian dan penyusunan kebijakan publik serta penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara
- pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur negara
- koordinasi dan fasilitasi pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara
- pelaksanaan tugas-tugas rutin administratif LAN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

PERAN LAN DALAM PENGUATAN SANKRI

Peranan LAN di masa depan adalah sebagai institusi berbasis keilmuan dan kompetensi (*Knowledge Institution*) dalam pembangunan kapasitas sistem dan aparatur administrasi negara untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia.

Memberikan inspirasi ("*inspiring*") dan sekaligus menggerakkan ("*generating*") upaya-upaya reformasi dan sekaligus transformasi nilai-nilai baru dalam penyelenggaraan SANKRI

PERAN LAN DALAM PENGUATAN SANKRI

- **Advokasi Kebijakan Pendayagunaan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Negara**
- **Fasilitasi Pengembangan Kader-kader Kepemimpinan dan Aparatur Negara**
- **Advokasi dan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah**
- **Katalisasi Pengembangan Model Colaborative Governance**
- **Advokasi Kesiambungan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bagi Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Generasi Kini dan Masa Depan.**
- **Pengembangan Teknologi Administrasi Negara**
- **Pengembangan Kolaborasi Kelembagaan Profesi baik Nasional maupun Internasional dalam Pengembangan Ilmu dan Praktik Administrasi Negara**

P E N U T U P

P E N U T U P

Melalui Penguatan SANKRI dan Pemberdayaan Aparatur Negara diharapkan akan terbangun sebuah **Tata Kepemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia** yang mampu mengakselerasi perwujudan Tujuan Negara dan pelaksanaan Tugas Pemerintahan Negara **Republik Indonesia** sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Lembaga Administrasi Negara:

*“Membangun Kapasitas
Administrasi Negara,
Memajukan Kesejahteraan
Rakyat”.*



SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (SANKRI)

**DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
2013**

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA DIKLAT

- 1) Nama Diklat : Diklat Kepemimpinan TK.IV
- 2) Mata Diklat :SANKRI
- 3) Alokasi Waktu : 9 Jp
- 4) Deskripsi Singkat : Mata Diklat ini membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan posisi dan kedudukan unit organisasinya dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembelajaran lembaga lembaga negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non struktural. Mata Diklat disajikan secara interaktif melalui metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan simulasi. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya menjelaskan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 5) Tujuan Pembelajaran
 - a. Hasil Belajar :Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu menjelaskan posisi dan kedudukan unit organisasinya dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Indikator Hasil Belajar : Peserta diharapkan mampu
 - 1) Menjelaskan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Menjelaskan kedudukan unit organisasinya dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia;

NO	INDIKATOR HASIL BELAJAR	MATERI POKOK		METODE	ALAT BANTU DAN MEDIA	ESTIMASI WAKTU				REFERENSI/KET
		MATERI POKOK	SUB MATERI			T	L	La p	Total	
	1) Menjelaskan SANKRI 2) Menjelaskan kedudukan unit organisasinya dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia	Lembaga-lembaga Negara	1) Penjelasan mengenai SANKRI (unsur, fungsi, proses, sumber daya, lembaga dll) 2) Mendiskusikan peran, kedudukan dan fungsi lembaga negara	<ul style="list-style-type: none"> • Penyajian • Pemutaran Film Pendek • Tanya Jawab 	Bahan Bacaan Bahan Tayang Film Pendek	3 jp			3 jp Bahan Tayang Film Pendek
		Pemerintah Pusat	3) Mendiskusikan sistem pemerintahan, dan organ pemerintah yang ada di Indonesia	Ceramah Diskusi	•		2jp		2jp	Kasus: Akutabilitas, etika atau integritas.
		Pemerintah Daerah	4) Mendiskusikan desentralisasi dan otonomi daerah, permasalahan dan tantangan saat ini dan ke depan	Kerja, Diskusi dan Presentasi Kelompok	In focus Flipchart Alat tulis Laptop dll		3jp		3 jp	
		Lembaga Non Struktural	5) Mendiskusikan peran, kedudukan, dan fungsi LNS	Diskusi	In focus Flipchart Alat tulis Laptop dll	1 jp			1 jp	
		JUMLAH						4 jp	-	5 jp

RENCANA PEMBELAJARAN

- 1) **Nama Diklat** : Diklat Kepemimpinan TK.IV
- 2) **Mata Diklat** : SANKRI
- 3) **Alokasi Waktu** : 9 Jp
- 4) **Deskripsi Singkat** : Mata Diklat ini membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan posisi dan kedudukan unit organisasinya dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembelajaran lembaga lembaga negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non struktural. Mata Diklat disajikan secara interaktif melalui metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan simulasi. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya menjelaskan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia

5) Tujuan Pembelajaran

- c. Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu menjelaskan posisi dan kedudukan unit organisasinya dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Indikator Hasil Belajar : Peserta diharapkan mampu
 - 2) Menjelaskan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Menjelaskan kedudukan unit organisasinya dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia;

6) Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

a. Materi Pokok

- 1) Internalisasi Akuntabilitas
- 2) Internalisasi Etika
- 3) Aktualisasi etika dan ingertis dalam pelaksanaan kegiatan diinstansinya.

b. Sub Materi Pokok

- 1) Penjelasan mengenai pentingnya integritas bagi aparatur pemerintah
- 2) Penjelasan mengenai pentingnya akuntabilitas dalam mewujudkan integritas

- 3) Menjelaskan pentingnya etika dalam mewujudkan integritas
- 4) Mendiskusikan penerapan dan penguatan etika di instansi peserta
- 5) Merumuskan aktualisasi etika dan integritas dalam pelaksanaan kegiatan instansi

7) KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR :

NO.	TAHAP KEGIATAN	MATERI POKOK		METODE	MEDIA DAN ALAT BANTU	ALOKASI WAKTU
		FASILITATOR	PESERTA			
1.	Pendahuluan	1) Menjelaskan deskripsi singkat dan tujuan pembelajaran.	Mendengarkan penjelasan	Ceramah	Infocus flipchart	1Jp
		2) Penjelasan mengenai pentingnya integritas bagi aparatur pemerintah	- Menonton film pendek - Berdiskusi	Nonton film Tanya jawab	Infocus Film Pendek Flip chart Alat tulis	
2.	Penyajian	8) Menfasilitasi diskusi mengenai pentingnya akuntabilitas dalam mewujudkan integritas	mendiskusikan Kasus	Diskusi	Flip chart Infocus dll	
		9) Menfasilitasi diskusi mengenai penerapan dan penguatan etika di instansi peserta	Mendiskusikan penerapan dan penguatan etika	Diskusi	Flip chart Infocus dll	
		10) Memandu peserta untuk merumuskan aktualisasi etika dan integritas dalam pelaksanaan kegiatan instansi, dilakukan per kelompok	Mendiskusikan, merumuskan dan menpresentasikan gagasan tentang aktualisasi etika dan integritas dalam pelaksanaan kegiatan di instansinya	Diskusi Presentasi	Infocus Flip chart Alat Tulis dll	

3.	Penutup		Menyampaikan komitmen terkait dengan aktualisasi integritas	Pembacaan Komitmen Peserta Pemaparan		
----	---------	--	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	--	--

9. EVALUASI PEMBELAJARAN

NO.	MATERI & SUB MATERI POKOK	BENTUK EVALUASI
1.	Akuntabilitas	Evaluasi dilakukan secara kualitatif, dengan cara peserta menulis laporan diksusi kasus, merumuskan aktualisasi dan membangun komitmen.
2.	Etika	
3.	Aktualisasi Etika dan Integritas dalam pelaksanaan kegiatan di instansinya	

10. REFERENSI

a) Bahan Bacaan

-
-

b) Bahan Tayangan

- Slide

c) Film Pendek

d)

Jakarta,

Disetujui Oleh Tim Validasi

(.....)

(.....)

(.....)